

*Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*  
2019, Vol. 8 , No. 2, 1-36

## **ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI POTENSIAL KOTA PONTIANAK**

**Reni Helvira, S.E.,M.E.**

*Institut Agama Islam Negeri Pontianak*

### **ABSTRACT**

*This research is one of the efforts to find out the potentials of the regions that influence economic growth in Pontianak City from 2013 to 2017 and some of the contributions of these potential sectors to regional economic growth. This study aims to determine which sectors are the base sector and potential sectors to be developed in Pontianak City, and to find out how much influence the base sector and potential sectors have on the development of Pontianak City's GRDP.*

*This study uses secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on constant prices of Pontianak City and West Kalimantan Province in 2013 to 2017. In this study the analysis method used is Location Quotient (LQ), Shift Share analysis and Hypothesis Test.*

*The results of the study used the Location Quotient (LQ) method, sectors that have an LQ index greater than one ( $LQ > 1$ ) and are the economic base sector, which is the industrial sector, the electricity and gas procurement sector, the water supply sector, waste management, waste and recycling re, the construction sector, the wholesale and retail trade sectors; car and motorcycle repair, transportation and warehousing sector, accommodation and food and beverage supply sector, information and communication sector, financial and insurance services sector, company service sector, government administration sector, compulsory defense and social security sector, education service sector, health service sector and social activities, and other service sectors.*

*The results of the Shift Share analysis method using the differential growth component (DJ) show that there are 6 sectors with a positive average DJ, namely, the water supply sector, waste management, waste and recycling, the wholesale and*

*retail sectors; car and motorcycle repair, accommodation and food and beverage supply sector, company service sector, education sector, health service sector. This indicates that the 6 sectors are growing faster than the same economic sector as the Province of West Kalimantan so that these sectors have high competitiveness and have the potential to be developed to spur economic growth in Pontianak City.*

**Keywords :** *Economic Potential, Location Quotion and Shift Share*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pertumbuhan serta memajukan kehidupan masyarakat.

Pembangunan daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperlukan adanya perencanaan dan strategi yang tepat sasaran. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, potensi dan karakteristik yang berbeda inilah yang dapat membentuk struktur perekonomian daerah. Dengan mengetahui gambaran struktur ekonomi tersebut, maka upaya pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Arsyad (2010:374) menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut”.

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,71 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang seluruhnya berjumlah 61 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi.

Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Wilayah

Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Hilmiyati (2013:3) menyatakan bahwa “konsekuensi untuk membangun ekonomi daerah membutuhkan peran pemerintah daerah serta masyarakat agar memiliki tujuan yang matang untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Peran antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dapat terlaksana dengan baik, karena ditandai dengan adanya dua undang-undang otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan sekarang sudah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. UU No. 25 tahun 1999 sekarang diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat”.

Lahirnya Undang-Undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan dengan adanya harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Era otonomi telah memberikan kesempatan pada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Daerah telah diberikan wewenang dalam mengelola sendiri keuangan serta menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di daerahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya dan faktor-faktor lainnya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Tarigan (2005:27) menyatakan bahwa “teori basis ekonomi berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut ke wilayah lain. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah dan bersifat tidak tergantung terhadap permintaan lokal. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Dari anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis.

Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah”.

Sukirno (2010:127) menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk menjadi lebih baik maka harapannya pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya tingkat kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi”. Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Laju pertumbuhan pertumbuhan PDRB Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

**Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013-2017**

<b>Lapangan usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	309.859,46	322.013,50	330.239,10	342.254,27	354.607,41
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	0	0
Industri pengolahan	3.358.854,67	3.451.969,33	3.536.632,14	3.663.494,17	3.809.001,81
Pengadaan listrik dan gas	20.548,80	23.339,06	24.656,36	28.358,03	29.646,82
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	75.245,53	78.554,14	81.399,38	87.805,51	91.941,15
Konstruksi	2.745.151,31	3.033.467,25	3.299.849,43	3.377.386,22	3.603.124,95
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	3.721.539,80	3.855.828,55	4.079.128,21	4.286.338,39	4.476.485,58
Transportasi dan pergudangan	1.818.243,92	1.926.810,80	2.001.082,15	2.121.145,93	2.197.774,05
Penyediaan akomodasi dan makan minum	635.401,45	670.651,48	705.069,40	752.514,34	796.908,83
Informasi dan komunikasi	799.726,67	886.762,75	984.906,35	1.086.908,71	1.210.925,43
Jasa keuangan dan asuransi	1.612.458,42	1.691.914,84	1.727.240,39	1.877.034,19	1.985.306,73
Real estate	527.673,82	560.188,56	579.667,30	608.360,83	633.486,14
Jasa perusahaan	126.921,60	133.343,73	142.591,02	153.536,80	161.181,74

Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	925.943,84	970.556,30	1.024.581,30	1.103.770,51	1.158.280,18
Jasa Pendidikan	1.331.643,35	1.403.108,63	1.450.197,55	1.496.985,0	1.544.319,52
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	327.018,65	342.214,73	356.343,19	372.639,85	385.647,57
Jasa lainnya	388.608,82	410.612,29	423.911,48	442.910,64	464.524,68
<b>Total PDRB</b>	<b>18.724.840,10</b>	<b>19.761.335,94</b>	<b>20.747.494,76</b>	<b>21.801.443,39</b>	<b>22.903.162,60</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kota Pontianak secara rata-rata dari tahun 2013-2017 selalu terjadi kenaikan PDRB.

Kontribusi sektor ekonomi Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp4.476.485,58 (dalam juta) pada tahun 2017. Sedangkan peringkat kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar Rp3.809.001,81 (dalam juta) pada tahun 2017. Untuk sektor Pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah sebesar Rp29.646,82 (dalam juta) pada tahun 2017. Sedangkan pada sektor Pertambangan dan penggalian tidak memberikan kontribusi apapun karena tidak terdapat sektor tersebut di Kota Pontianak. Dengan melihat peranan masing-masing sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Pontianak tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pengembangan potensial dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

**Tabel 1.2**

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013-2017**

Lapangan usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	24.401.601,0	24.967.378,3	25.571.667,7	26.613.905,1	28.353.271,4
Pertambangan dan penggalian	4.590.067,6	4.594.851,0	4.622.382,7	5.616.901,0	5.675.012,5
Industri pengolahan	17.311.109,3	18.045.671,8	18.677.203,6	19.502.056,4	20.093.405,6

Pengadaan listrik dan gas	76.431,3	93.775,0	100.393,1	122.414,7	127.933,4
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	148.266,3	154.583,46	160.308,2	167.432,7	175.151,1
Konstruksi	10.583.020,1	11.721.859,0 9	12.817.662,5	13.154.172,3	14.033.227,2
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	15.462.849,1	16.153.002,0	17.161.336,0	17.819.299,0	18.516.434,5
Transportasi dan pergudangan	4.234.831,5	4.481.899,9	4.716.831,1	5.004.381,2	5.237.558,0
Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.313.352,9	2.447.718,0	2.592.128,0	2.705.505,6	2.808.797,0
Informasi dan komunikasi	3.936.740,6	4.410.223,25	4.903.918,0	5.408.171,7	6.297.482,7
Jasa keuangan dan asuransi	3.590.896,6	3.853.258,9	4.060.629,1	4.446.891,5	4.770.803,2
Real estate	3.049.564,5	3.236.803,95	3.350.904,5	3.429.565,9	3.516.275,8
<b>Lapangan usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jasa perusahaan	486.954,7	515.909,18	552.583,4	569.879,1	577.140,9
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.782.780,7	5.059.916,82	5.423.333,8	5.822.888,5	6.100.735,5
Jasa pendidikan	4.423.647,7	4.664.300,63	4.810.077,1	4.890.613,1	4.961.131,6
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.493.810,8	1.559.912,29	1.627.155,5	1.672.097,1	1.737.211,5
Jasa lainnya	1.094.414,7	1.153.899,41	1.198.240,8	1.247.256,7	1.325.165,0
<b>Total PDRB</b>	<b>101.980.339,4</b>	<b>107.114.962,9</b>	<b>112.346.755,2</b>	<b>118.193.431,6</b>	<b>124.306.736,9</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2013-2017 sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp28.353.271,4 (dalam juta) pada tahun 2017. Sektor Industri pengolahan berada pada posisi kedua yaitu sebesar Rp20.093.405,6 (dalam juta) pada tahun 2017. Dan sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada posisi ketiga sebesar Rp 18.516.434,5 (dalam juta) pada tahun

2017. Sedangkan untuk sektor yang paling terendah yaitu sektor Pengadaan listrik dan gas sebesar Rp127.933,4 (dalam Juta) pada tahun 2017.

Todaro (2000:22) menyatakan bahwa “pembangunan merupakan multidimensi dari suatu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor-sektor ekonomi yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun”.

Melihat seluruh kondisi di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DI KOTA PONTIANAK”.

## **2. KERANGKA TEORI**

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Jhingan (2010:57) menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi para penduduknya. Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat di manfaatkan secara tepat”.

Menurut Boediono (2009:2) menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi output totalnya (PDB) dan sisi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita adalah pendapatan total dibagi jumlah penduduk”.

Menurut Sadono Sukirno (2010:492) menyatakan bahwa “ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu”:

- a. Tanah dan Kekayaan Alam lainnya



Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang tersedia. Kekayaan alam dapat mempermudah dalam mengembangkan perekonomian terutama pada masa permulaan pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya banyak hambatan dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Jika kekayaan alam suatu negara yang dapat dimanfaatkan dengan baik maka hambatan pertumbuhan ekonomi akan dapat teratasi dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat.

b. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari kurun waktu ke waktu dapat menjadi penghambat suatu pertumbuhan ekonomi. Munculnya penghambat perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi akibat dari pertambahan luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dan barang-barang yang dihasilkan perusahaan menjadi besar pula. Akibat buruk dari pesatnya pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia.

c. Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang modal penting artinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Barang modal yang bertambah jumlahnya dan teknologi yang semakin modern memegang peranan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi.

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sistem sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah masyarakat masih menggunakan cara tradisional dalam melakukan proses produksi. Sikap

masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah sikap berhemat dan bertujuan untuk investasi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

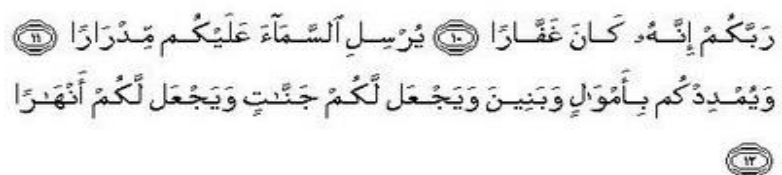
Ketika PDB meningkat maka terjadi pertumbuhan ekonomi

2) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah. Ketika PDRB per kapita meningkat maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Marthon (dalam Nurdini, 2015:16-17) menyatakan bahwa “dalam islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan diri dari segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah”.

Pertumbuhan ekonomi dalam islam telah digambarkan dalam Al-Qur’an yaitu dalam QS Nuh:10-12



Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.

## **Teori Pembangunan Ekonomi**

Menurut Adisasmita (2013:19) menyatakan bahwa “pembangunan merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan kearah yang positif termasuk peraturan, sikap, cara hidup dan perubahan organisasi, sosial dan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi membahas pemanfaatan faktor-faktor ekonomi yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Todaro dan Smith (2011:16) menyatakan bahwa “dari sudut pandang ekonomi pembangunan bisa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak *output* yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Dari definisi yang dikemukakan Todaro dan Smith ada tiga nilai inti dalam makna pembangunan yaitu: *pertama*, kecukupan dalam arti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupan yang mencakup makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. *Kedua*, harga diri dalam arti suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. *Ketiga*, kebebasan dari sikap menghamba dalam arti kebebasan dari kondisi kekurangan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif dan keyakinan dogmatis. Khususnya yang menyatakan kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan tuhan”.

Menurut Kuncoro (2012:6) menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah (garis kemiskinan *absolut*) tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang”.

Adapun menurut Arsyad (2010:11) menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi yang dikemukakan oleh Arsyad tersebut diatas mengandung tiga unsur, yaitu”:

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan secara terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.

- b. Usaha meningkat pendapatan per kapita.
- c. Kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Lewis dalam Jhingan (2010:41-42) menyatakan bahwa “pendorong utama pembangunan ekonomi adalah upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kapita. Tiga pendorong ini, meski secara konsep dapat dibedakan namun biasanya nampak berbarengan. Akan tetapi karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, psikologi, sosial dan budaya merupakan syarat yang sama pentingnya dalam kondisi ekonomi. Disini Lewis menyatakan ada beberapa persyaratan dasar pembangunan ekonomi yaitu”:

- a. Atas dasar kekuatan sendiri

Ialah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian didalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri

- b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar.

Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan penghambat ekspansi sektor dan pembangunan. Untuk menghilangkan hal ini, lembaga sosial ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti dengan yang lebih baik.

- c. Perubahan struktur.

Perubahan struktur ini mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang modern.

Menurut Irfan dan Laily (2016:13) menyatakan bahwa “ekonomi pembangunan syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Beberapa konsep dasar yang menjadi basis dalam ekonomi pembangunan syariah antara lain”:

- a. Konsep tauhid, khalifah dan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi
- b. Aspek pembangunan: fisik materiil, moral spiritual
- c. Fokus utama: manusia (subjek dan objek pembangunan)
- d. Peran negara (*role of the state*)

Menurut Irfan dan Laily (2016:13) menyatakan bahwa “dalam islam, manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas utamanya ini sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut akan memengaruhi potensi mana yang dapat dioptimalkan. Sebagaimana disebutkan dalam QS as-Syams (91):8-10”.

فَاللَّهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ  
دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

### **Teori Pengembangan Wilayah**

Adisasmita (2013:63) menyatakan bahwa “wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan fasilitas pelayanan, dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut”.

Rustiadi, dkk (dalam Umami, 2014:27) menyatakan bahwa “pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan terkait dengan pengembangan fungsi tertentu dari suatu unit wilayah, mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan. Sementara itu, pengembangan wilayah seharusnya mempunyai cakupan yang lebih luas yaitu menelaah keterkaitan antar kawasan”.

Rustiadi, dkk (dalam Umami, 2014:27) menyatakan bahwa “pada laporan PBB, 1965, yang berjudul *Toward Accelerated Development: Proposals for the second decade*, yang disusun oleh UN-Committee For development, secara tegas diusung tiga prasyarat terhadap percepatan pengembangan wilayah yaitu”:

1. Mobilisasi serta penggerakan potensi dan sumber daya domestik

2. Partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan dan upaya memenuhi standar hidup minimum masyarakat banyak
3. Mempraktikkan “perencanaan partisipatif” untuk membangun kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan.

Rustiadi, dkk (dalam Umami, 2014:28) menyatakan bahwa “sedangkan strategi dalam pengembangan wilayah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *demand side strategy* dan *supply side strategi*. *Demand side strategy* atau strategi dari sisi permintaan adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. Peningkatan taraf hidup penduduk diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap barang barang non pertanian. Adanya peningkatan tersebut akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan *supply side strategi* atau strategi dari sisi penawaran adalah suatu strategi yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi ke luar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditi yang pada umumnya diproses dari sumber daya alam lokal. Kegiatan produksi terutama ditujukan untuk ekspor yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan lokal dan selanjutnya akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah tersebut”.

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Tarigan (2005:46) menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam bentuk nilai riil, dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut”.

Istiqomah (2019:28-29) menyatakan bahwa “kegiatan produksi (modal, tanah, teknologi dan tenaga kerja) dalam islam yang dilakukan oleh manusia hendaklah menjaga keseimbangan antar sesama. Dengan menjaga keseimbangan antara produksi dan menjaga alam mengantarkan kita kepada tujuan utama yaitu kesejahteraan yang berkesinambungan serta tujuan pokok harta dalam islam yaitu *maqashid syariah*. Produksi yang tidak mempertimbangkan keadaan alam akan berhenti disaat sumberdaya alam tersebut habis dan dampaknya alam akan mengalami pencemaran dan kerusakan yang juga mengantarkan kita kepada ketidaksejahteraan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda”:

عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ  
 الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتَ نَبْتًا فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ۚ وَلْيُجِدَّ أَعْنَاقُكُمْ شَفْرَتَهُ  
 وَلْيُؤْيُؤْ بِحَبْلِ نَبِيحَتِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan sedangkanlah hewan sembelihmu* (H.R. Muslim, 1991: 3/1548)”.

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah yaitu:

a. Teori Basis Ekonomi

Aktivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan kegiatan berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non basis yakni kegiatan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berada dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Tarigan, (2005:53) menyatakan bahwa “teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk atau jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negeri itu maupun ke luar negeri”.

Tarigan (2005:32), menyatakan bahwa “mengelompokkan kegiatan ekonomi menjadi dua yaitu”:

1) Kegiatan basis ekonomi

Pertumbuhannya memimpin dan menentukan perkembangan daerah secara keseluruhan. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas ekonomi daerah.

2) Kegiatan non basis ekonomi

Kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat lokal.

Tarigan (2005:35) menyatakan bahwa “untuk menentukan antara kegiatan basis dan non basis ada beberapa metode yang dilakukan yaitu”:

1) Metode langsung

Metode ini dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.

2) Metode tidak langsung

Metode ini menggunakan asumsi berdasarkan kondisi di wilayah itu, ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis.

3) Metode campuran

Metode ini gabungan dari metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpulan data seperti BPS.

4) Metode Location Quotient

Metode ini termasuk metode tidak langsung dengan menggunakan metode ini membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja atau nilai tambah untuk sektor yang sama secara regional.

Menurut Arsyad (2010:116), menyatakan bahwa “teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubung langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi pada intinya membedakan aktivitas sektor basis dan aktivitas non basis. Aktivitas sektor basis



adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis adalah sektor sekunder artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh. Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Berkembangnya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar”.

Untuk mengukur kinerja basis ekonomi di suatu wilayah menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)*. Arsyad (2010) menyatakan bahwa “teknik *Location Quotient* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua kelompok yaitu”:

- 1) Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
- 2) Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis).

#### b. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Tarigan (2005:54) menyatakan bahwa “teori pertumbuhan cepat diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Inti dari teori ini adalah negara perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik itu dari potensi alam atau dari sektor tersebut memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Bahwa, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh”.

#### c. Teori Rostow

Prathama Rahardja, (2004:332) menyatakan bahwa “teori ini melihat pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Salah satu teori yang terkenal adalah teori W.W Rostow tentang tahap-tahap

pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam lima tahap, yaitu: 1) Tahap Perekonomian Tradisional. 2) Tahap Pra Lepas Landas. 3) Tahap Lepas Landas (*Take Off*). 4) Tahap Kedewasaan (*Maturity*). 5) Tahap Konsumsi Massa Tingkat Tinggi (*High Mass Consumption*)”.

#### d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Hilmiyati (2013:20) menyatakan bahwa “teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia. Menurut teori ini tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Analisis lanjutan dari paham neo klasik menunjukkan bahwa terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap, diperlukan suatu tingkat *s (saving)* yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah itu”.

#### e. Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Hilmiyati (2013:20) menyatakan bahwa “teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Damor (1957) di Amerika Serikat. Teori ini didasarkan atas asumsi:

- 1) Perekonomian bersifat tertutup
- 2) Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk”.

### **Sektor Ekonomi Potensial**

Tjokroamidjojo (dalam Widodo, 20019:24) menyatakan bahwa “sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibanding sektor-sektor lain dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Sektor ekonomi dapat dikatakan sebagai sektor potensial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis wilayah, sehingga semakin besar barang dan jasa yang dapat diekspor maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang diperoleh suatu wilayah.
- b. Memiliki kemampuan daya saing yang relatif baik dibanding sektor sejenis dari wilayah lain. Perkembangan sektor ini akan mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah.
- c. Memiliki sumberdaya yang dapat mendukung bagi pengembangannya, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat ketersediaan sumber daya yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan sektor ekonomi wilayah tersebut.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

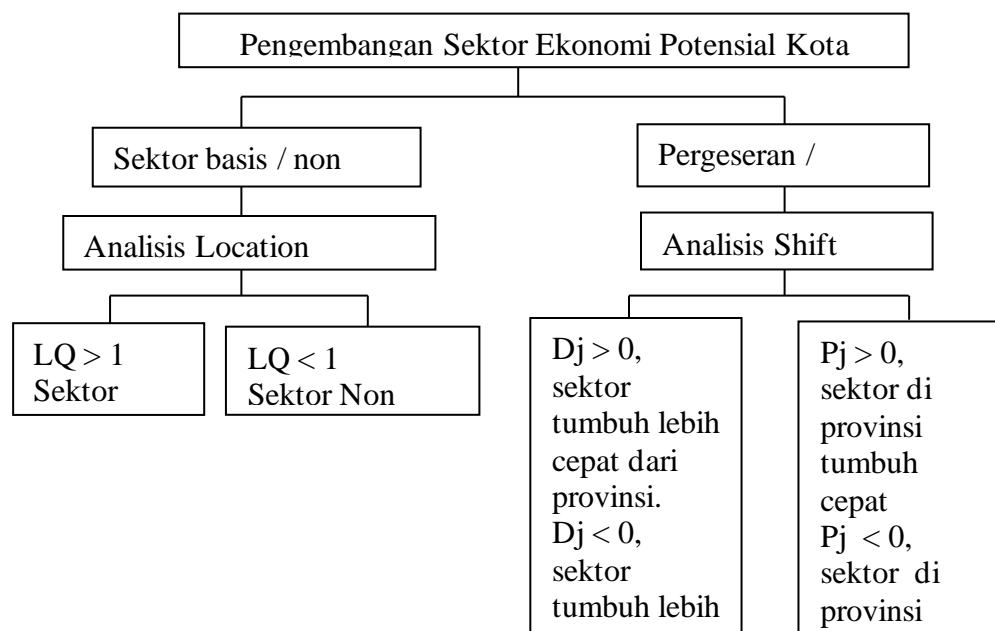
BPS (2018:4) menyatakan bahwa “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen”.

Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto yaitu:

- a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
- e. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Bagan kerangka pemikiran pengembangan sektor ekonomi potensial Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran pengembangan sektor ekonomi potensial Kota Pontianak**

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini lebih difokuskan pada analisis pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di Kota Pontianak pada periode tahun 2013-2017. Selain itu, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan rumus-rumus yang sudah tersedia dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi terkait. Data yang digunakan yaitu: *Pertama*,

data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017. *Kedua*, data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha Kota Pontianak tahun 2013-2017. Data yang digunakan berasal dari BPS Kota Pontianak.

### 1. *Location Quotient (LQ)*

Menurut Tarigan (2007:82) menyatakan bahwa “analisis *Location Quotient (LQ)* adalah salah satu indikator sederhana yang menunjukkan “kekuatan” akan besar dan kecilnya sektor pada suatu daerah dibandingkan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas wilayahnya. Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor berarti semakin tinggi pula *competitive advantage* daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut. Dalam analisis *Location Quotient (LQ)* biasanya digunakan untuk mengidentifikasi Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah dalam menentukan sektor basis dan sektor non basis. Bila sektor unggulan tersebut dikembangkan dengan baik dan benar, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yang akan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal”.

Warpani (dalam Fatmasari, 2007:42) menyatakan bahwa “untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor non basis digunakan analisis LQ. Teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antar daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif dapat dinyatakan dengan rumus”.

$$LQ = \frac{\frac{S_i}{S}}{\frac{N_i}{N}}$$

Keterangan:

LQ : Nilai *Location Quotient*

S<sub>i</sub> : PDRB Sektor i di Kota Pontianak

S : PDRB total di Kota Pontianak

N<sub>i</sub> : PDRB Sektor i di Provinsi Kalbar

N : PDRB total di Provinsi Kalbar

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut : Jika LQ lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ), merupakan sektor basis dan berpotensi

untuk ekspor, artinya spesialisasi kota/kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi. Jika LQ lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ), merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi. Jika LQ sama dengan satu ( $LQ = 1$ ), berarti tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat provinsi.

## 2. Analisis *Shift Share*

Fatmasari (2007:44) menyatakan bahwa “analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lambat pertumbuhannya akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya”.

Rumus dari analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut:

$$G : Y_{jt} - Y_{jo}$$

$$: (N_j + P_j + D_j)$$

$$N_j : Y_{jo} (Y_t / Y_o) - Y_{jo}$$

$$(P + D)_j : Y_{jt} - (Y_t / Y_o) Y_{jo}$$

$$P_j : \sum_i [(Y_{jt} / Y_{io}) - (Y_t / Y_o)] Y_{ijo}$$

$$D_j : \sum_t [ Y_{ijt} - (Y_{it} / Y_{io}) Y_{ijo} ]$$

$$: (P + D)_j - P_j$$

Keterangan:

G<sub>j</sub> : Pertumbuhan PDRB Total Kota Pontianak

N<sub>j</sub> : Komponen *Share*

(P + D)<sub>j</sub> : Komponen *Net Shift*

P<sub>j</sub> : *Proportional Shift* Kota Pontianak

D<sub>j</sub> : *Differential Shift* Kota Pontianak

Y<sub>j</sub> : PDRB Total Kota Pontianak

Y : PDRB Total Provinsi Kalbar

o,t : Periode awal dan Periode akhir

i : Subskripsi sektor pada PDRB

Jika  $D_j > 0$ , maka pertumbuhan sektor  $i$  di Kota Pontianak lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Kalbar dan bila  $D_j < 0$ , maka pertumbuhan sektor  $i$  di Kota Pontianak relatif lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Kalbar.

Bila  $P_j > 0$ , maka Kota Pontianak akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat provinsi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya jika  $P_j < 0$ , maka Kota Pontianak akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat provinsi tumbuh lebih lambat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### *Analisis Location Quotient (LQ)*

Pada analisis *Location Quotient* (LQ) dapat digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor dan manakah yang termasuk sektor non basis. Hal tersebut dapat dilihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut sektor basis. sebaliknya apabila angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor non basis.

**Tabel 4.1**

**Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kota Pontianak Tahun 2013-2017**

Lapangan Usaha	LQ 2013	LQ 2104	LQ 2015	LQ 2016	LQ 2017	LQ Rata-rata	KET
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0.0692	0.0699	0.0699	0.0697	0.0679	0.0693	Non basis
Pertambangan dan penggalan	0	0	0	0	0	0	
Industri pengolahan	1.0567	1.0369	1.0254	1.0184	1.0289	1.0332	Basis
Pengadaan listrik dan gas	1.4642	1.3491	1.3299	1.2559	1.2577	1.3314	Basis
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.7630	2.7545	2.7495	2.8431	2.8490	2.7920	Basis
Konstruksi	1.4127	1.4027	1.3941	1.3910	1.3935	1.3990	Basis
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1.3108	1.2939	1.2871	1.3041	1.3121	1.3016	Basis
Transportasi dan pergudangan	2.3384	2.3303	2.2973	2.2979	2.2775	2.3083	Basis
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.4959	1.4851	1.4729	1.5079	1.5399	1.5003	Basis
Informasi dan komunikasi	1.1064	1.0899	1.0875	1.0896	1.0436	1.0834	Basis

Jasa keuangan dan asuransi	2.4456	2.3800	2.3033	2.2884	2.2586	2.3352	Basis
Real estate	0.9424	0.9381	0.9367	0.9617	0.9778	0.9513	Non basis
Jasa perusahaan	1.4195	1.4000	1.3973	1.4606	1.5158	1.4388	Basis
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.0544	1.0397	1.0220	1.0277	1.0305	1.0350	Basis
Jasa pendidikan	1.6395	1.6306	1.6326	1.6594	1.6895	1.6503	Basis
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.1923	1.1891	1.1859	1.2082	1.2049	1.1961	Basis
Jasa lainnya	1.9339	1.9288	1.9157	1.9252	1.9026	1.9212	Basis

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 di atas Kota Pontianak memiliki 14 sektor basis, sektor tersebut yaitu sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2.7920 sehingga sektor ini merupakan sektor basis dengan nilai rata-rata terbesar. Sektor kedua dengan nilai rata-rata terbesar yaitu sektor Jasa keuangan dan asuransi dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2.3352. Sektor ketiga yang memiliki peran terbesar yaitu sektor Transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2.3083. Sektor dengan urutan keempat yaitu sektor Jasa lainnya dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.9212. Sektor urutan kelima yaitu sektor Jasa pendidikan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.6503. Sektor urutan keenam dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.5003 yaitu sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor dengan urutan ketujuh yaitu sektor Jasa perusahaan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.4388.

Selanjutnya sektor yang berada pada urutan kedelapan yaitu sektor Konstruksi dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.3990. Sektor urutan kesembilan pada sektor Pengadaan listrik dan gas dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.3314. Urutan kesepuluh pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.3016. Sektor dengan urutan kesebelas yaitu sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.1961. Sektor keduabelas sektor Informasi dan komunikasi dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.0834. sektor urutan ketiga belas sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan LQ rata-rata sebesar 1.0350. sektor keempat belas sektor Industri pengolahan yang memiliki LQ rata-rata sebesar 1.0332.

Dari hasil analisis ini menunjukkan ke 14 sektor tersebut merupakan sektor basis yang membuktikan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat



atau baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Sektor ini juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pontianak sendiri dan bahkan berpotensi sangat tinggi ekspor ke daerah lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Sektor yang merupakan non basis selama periode 2013-2017 terdapat 2 sektor dan 1 sektor yang tidak memberikan kontribusi apapun di Kota Pontianak. Sektor tersebut yaitu sektor Real estate dengan nilai LQ rata-rata sebesar 0.9513. Selanjutnya sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 0.0679. Sektor Pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi apapun dan tidak berpengaruh terhadap Kota Pontianak. Kedua sektor ini dalam memproduksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kota Pontianak bahkan perlu mengimpor dari daerah lainnya.

#### **a. Analisis *Shift Share***

Analisis *shift share* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perubahan atau pergeseran yang terjadi pada suatu sektor ekonomi di Kota Pontianak. Melalui analisis *shift share* ini dapat diketahui bahwa di Kota Pontianak ada beberapa sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya berjalan lambat atau mengalami pertumbuhan yang berada di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil analisis *shift share* ini selanjutnya akan dapat diidentifikasi tingkat spesialisasi dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi yang terdapat di Kota Pontianak.

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan yaitu wilayah yang lebih luas, dalam hal ini wilayah Kota Pontianak dikaitkan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

Pertumbuhan PDRB total (G) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share* yaitu:

- a. Komponen *national share* (N) adalah banyaknya pertambahan PDRB seandainya pertumbuhan sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi selama periode yang tercakup dalam studi.

- b. Komponen *proportional shift* (P) mengukur besarnya *net shift* kabupaten yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB pada kabupaten yang bersangkutan. Apabila  $P_j > 0$  artinya Kabupaten yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi tumbuh relatif cepat dan apabila  $P_j < 0$  berarti kabupaten yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang di tingkat Provinsi pertumbuhannya dengan lambat atau bahkan sedang merosot.
- c. Komponen *differential shift* (D) mengukur besarnya *net shift* yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di kabupaten yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat provinsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *differential shift component* yang positif ( $D_j > 0$ ), sebaliknya kabupaten yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai *differential shift component* yang negatif ( $D_j < 0$ ).

Tabel 4.2

Komponen *Shift Share* Kota Pontianak Tahun 2013-2017

Tahun	G <sub>j</sub>	N <sub>j</sub>	G <sub>j</sub> -N <sub>j</sub>
2013-2014	1036495.83	942779.7834	93716.047
2014-2015	986158.81	965198.5839	20960.226
Tahun	G <sub>j</sub>	N <sub>j</sub>	G <sub>j</sub> -N <sub>j</sub>
2015-2016	1053948.64	1079727.636	-25779
2016-2017	1101719.2	1127633.658	-25914.46

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2014 komponen pertumbuhan PDRB total Kota Pontianak (G<sub>j</sub>) adalah 1036495.83 padahal banyaknya pertumbuhan PDRB Kota Pontianak seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat (N<sub>j</sub>) sebesar 942779.7834 ini berarti terjadi penyimpangan yang positif sebesar 93716.047 dan ini menunjukkan pertumbuhan PDRB di Kota Pontianak lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2014-2015 komponen pertumbuhan PDRB total Kota Pontianak (G<sub>j</sub>) sebesar 986158.81 padahal banyaknya pertumbuhan PDRB Kota Pontianak seandainya

pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat (Nj) sebesar 965198.5839 ini berarti terjadi penyimpangan yang positif sebesar 20960.226 dan menunjukkan pertumbuhan PDRB di Kota Pontianak lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2015-2016 kedua komponen (Gj) dan (Nj) mengalami masing-masing kenaikan. Dimana (Gj) sebesar 1053948.64 dan (Nj) sebesar 1079727.636 namun penyimpangan yang terjadi menunjukkan angka negatif yaitu sebesar -25779 hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kota Pontianak lebih rendah jika dibandingkan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2016-2017 komponen pertumbuhan ekonomi total Kota Pontianak (Gj) mengalami peningkatan menjadi sebesar 1101719.2 dan komponen pertumbuhan ekonomi total Provinsi Kalimantan Barat (Nj) juga mengalami peningkatan sebesar 1127633.658 namun penyimpangan yang terjadi menunjukkan angka negatif sebesar 25914.46 hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kota Pontianak lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan komponen *proportional shift* (Pj) dan *differential shift* (Dj). Untuk itu analisis ini selanjutnya yaitu analisis untuk mencari sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat atau lambat dan sektor mana yang memiliki daya saing yang tinggi dan tidak. Sehingga digunakan perhitungan terhadap komponen pertumbuhan *proporsional* dan komponen pertumbuhan *differential*.

**Tabel 4.3**

**Komponen Pertumbuhan Proporsional (Pj) Kota Pontianak**

Sektor	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rata-rata
Pertanian, kehutanan dan perikanan	-8416.545201	-7934.290138	-3726.365282	4665.836366	-3852.841064
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	0	0
Industri Pengelolaan	-26587.08621	-47797.60495	-27860.64343	-78400.54449	-45161.46977
Pengadaan listrik dan gas	3628.307405	507.1920674	4125.31413	-188.3223086	2018.122823
Pengadaan air, pengelolaan	-582.5270392	-927.6811381	-618.5399499	-493.850086	-655.6495533

sampah, limbah dan daur ulang					
Konstruksi	157191.4424	135416.945	-85095.67607	51012.69289	64631.35106
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-21270.6902	52366.6275	-55890.17175	-54009.52107	-19700.93888
Transportasi dan pergudangan	14534.01301	6888.334964	17852.08182	-10877.98561	7099.111046
Penyediaan akomodasi dan makan minum	4914.113499	6810.487164	-5853.590719	-10192.5515	-1080.385389
Informasi dan Komunikasi	55920.26775	55955.15378	50018.81628	122511.4544	71101.42305
Jasa keuangan dan asuransi	36626.41282	8415.682385	74413.72409	39637.59836	39773.35441
Real estate	5830.910526	-7613.962773	-16559.16424	-16084.95766	-8606.793537
Jasa perusahaan	1156.481994	2966.071802	-2957.571129	-5984.892478	-1204.977453
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7033.493824	22303.32624	22163.65776	-4422.292742	11769.54627
Jasa Pendidikan	5397.064363	-24679.44137	-35416.16427	-55843.12718	-27635.41711
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-1994.254745	-1962.851992	-8702.475711	-4762.75748	-4355.584982
Jasa lainnya	1556.166885	-4276.669263	-4720.167014	4757.23238	-670.859253
<b>Total</b>	<b>234937.5711</b>	<b>196437.3193</b>	<b>-78826.93548</b>	<b>-18675.98821</b>	<b>83467.99167</b>

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel pertumbuhan komponen proporsional Kota Pontianak selama periode penelitian ini diketahui bahwa nilai *proportional shift* (Pj) Kota Pontianak dari tahun 2013-2017 terdapat nilai positif juga nilai negatif. Dalam hal ini Kota Pontianak berspesialisasi pada sektor yang sama dengan sektor yang tumbuh cepat di perekonomian Provinsi Kalimantan Barat apabila rata-rata nilai Pj positif, sedangkan apabila rata-rata nilai Pj negatif maka Kota Pontianak berspesialisasi pada sektor yang tumbuh lambat di perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

Sektor-sektor yang memiliki nilai rata-rata komponen proporsional positif yaitu Pengadaan listrik dan gas, Konstruksi, Transportasi dan pergudangan, Informasi dan

komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Semua sektor ini memiliki komponen pertumbuhan proporsional positif, menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB Provinsi.

Sektor-sektor yang mempunyai nilai rata-rata komponen pertumbuhan proporsional negatif yaitu Pertanian, kehutanan dan peternakan, Industri pengelolaan, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Real estate, Jasa perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa lainnya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Kota Pontianak berspesialisasi pada sektor yang sama dengan sektor yang tumbuh lambat di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4.4

**Komponen Pertumbuhan Diferensial (Dj) Kota Pontianak**

<b>Sektor</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>Rata-rata</b>
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4969.615967	431.8564051	-1444.552103	-10015.0747	-1514.538608
Pertambangan dan penggalan	0	0	0	0	0
Industri Pengelolaan	-49411.65884	-36143.35497	-29328.42472	34421.69592	-20115.43565
Pengadaan listrik dan gas	-1872.649339	-329.8365821	-1706.794301	10.35317696	-974.7317613
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	102.6349922	-63.88124378	2788.536622	87.93576789	728.8065346
<b>Sektor</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>Rata-rata</b>
Konstruksi	-7089.843579	-17197.73093	-9096.141061	37.87720796	-8336.459591
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-31814.62906	-17396.34345	50817.02772	22454.92238	6015.244398
Transportasi dan pergudangan	2486.95306	-26727.77616	-1927.311082	-22205.68193	-12093.45403
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-1655.614344	-5149.048183	16605.76986	15664.82864	6366.483993

Informasi dan Komunikasi	-9149.25235	-1123.509476	727.6912268	-54712.78887	-16064.46487
Jasa keuangan dan asuransi	-38354.90872	-55727.95247	-14507.83947	-28450.68238	-34260.34576
Real estate	116.2267578	-268.4624216	15086.0275	9744.090256	6169.470523
Jasa perusahaan	-1124.668355	-231.6599377	6482.722469	5688.46619	2703.715092
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-9040.947767	-15682.99166	3704.961926	1841.76731	-4794.302548
Jasa Pendidikan	-978.0734552	3236.63874	22506.52737	25749.2638	12628.58911
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	725.4254681	-623.4059235	6454.556336	-1503.530722	1263.26129
Jasa lainnya	881.4191347	-2479.585456	1658.402856	-6051.808589	-1497.893014
<b>Total</b>	<b>-141209.9704</b>	<b>-175477.0437</b>	<b>68821.16115</b>	<b>-7238.366542</b>	<b>-63776.05489</b>

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui pertumbuhan diferensial (Dj) rata-rata sektor ekonomi Kota Pontianak dari tahun 2013-2017 menunjukkan adanya nilai positif dan ada juga nilai negatif. Nilai positif menunjukkan bahwa di Kota Pontianak terdapat sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor ekonomi yang sama dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa sektor tumbuh lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 7 sektor dengan nilai Dj rata-rata positif di Kota Pontianak yaitu, sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Real estate, Jasa perusahaan, Jasa pendidikan, dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Ketujuh sektor tersebut merupakan sektor yang pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan PDRB Kota Pontianak. Sedangkan kesembilan sektor lainnya dengan Dj rata-ratanya negatif sehingga pertumbuhan sektor tersebut lambat.

### b. Tipologi Sektor

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan dari nilai *Location Quotient* ( $LQ > 1$ ), komponen *differential shift* ( $Dj > 0$ ), dan komponen *proportional shift* ( $Pj > 0$ ) untuk ditentukan tipologi sektoralnya. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis juga komponen pertumbuhan internal dan eksternal. Menggabungkan indeks LQ

dengan komponen Dj dan P dalam analisis Shift Share. Tipologi sektoral diharapkan dapat memperjelas atau memperkuat hasil analisis.

Saerofi (2015:64-65) menyatakan bahwa “tipologi sektoral adalah sebagai berikut”:

- 1) Tipologi I : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan ( $LQ \text{ rata-rata} > 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih cepat dibandingkan provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} > 0$ ) meskipun di tingkat provinsi pertumbuhannya cepat ( $Pj \text{ rata-rata} > 0$ ).
- 2) Tipologi II : Sektor basis dengan ( $LQ \text{ rata-rata} > 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih cepat dibandingkan dengan provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} > 0$ ) karena di tingkat provinsi pertumbuhannya lambat ( $Pj \text{ rata-rata} < 0$ ).
- 3) Tipologi III : Sektor basis ( $LQ \text{ rata-rata} > 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih lambat dibandingkan provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} < 0$ ) padahal tingkat provinsi pertumbuhannya cepat ( $Pj \text{ rata-rata} > 0$ ).
- 4) Tipologi IV : Sektor basis ( $LQ \text{ rata-rata} > 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih lambat dibandingkan provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} < 0$ ) padahal tingkat provinsi pertumbuhannya juga lambat ( $Pj \text{ rata-rata} < 0$ ).
- 5) Tipologi V : Sektor non basis ( $LQ \text{ rata-rata} < 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tingkat provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} > 0$ ) padahal di provinsi pertumbuhannya juga cepat ( $Pj \text{ rata-rata} > 0$ ).
- 6) Tipologi VI : Sektor non basis ( $LQ \text{ rata-rata} < 1$ ) dan di Kota Pontianak pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} > 0$ ) meskipun di provinsi pertumbuhannya lambat ( $Pj \text{ rata-rata} < 0$ ).
- 7) Tipologi VII : Sektor non basis ( $LQ \text{ rata-rata} < 1$ ) dan pertumbuhan di Kota Pontianak lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} < 0$ ) padahal pertumbuhan di provinsi lebih cepat ( $Pj \text{ rata-rata} > 0$ ).
- 8) Tipologi VIII : Sektor non basis ( $LQ \text{ rata-rata} < 1$ ) dan di Kota Pontianak pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi ( $Dj \text{ rata-rata} < 0$ ) karena di tingkat provinsi pertumbuhannya juga lambat ( $Pj \text{ rata-rata} < 0$ ).

**Tabel 4.5**  
**Makna Tipologi Sektor Ekonomi**

Tipologi	LQ rata-rata	Dj rata-rata	Pj rata-rata	Tingkat Kepotensialan
I	$LQ > 1$	$Dj > 0$	$Pj > 0$	Istimewa
II	$LQ > 1$	$Dj > 0$	$Pj < 0$	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$Dj < 0$	$Pj > 0$	Baik
IV	$LQ > 1$	$Dj < 0$	$Pj < 0$	Lebih dari Cukup
V	$LQ < 1$	$Dj > 0$	$Pj > 0$	Cukup
VI	$LQ < 1$	$Dj > 0$	$Pj < 0$	Hampir dan Cukup
VII	$LQ < 1$	$Dj < 0$	$Pj > 0$	Kurang
VII	$LQ < 1$	$Dj > 0$	$Pj < 0$	Kurang Sekali

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa sektor ekonomi dalam Tipologi I adalah sektor dengan tingkat kepotensialannya (istimewa) dapat di kembangkan karena sektor tersebut merupakan sektor basis ( $LQ > 1$ ). Bahkan di Kota Pontianak pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan tingkat provinsi ( $Dj > 0$ ), walaupun di provinsi juga tumbuh dengan cepat ( $Pj > 0$ ). Sektor ini akan mendatangkan pendapatan yang tinggi juga dapat meningkatkan PDRB Kota Pontianak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan indeks *Location Quotient* pada masing-masing sektor yang ada di Kota Pontianak menunjukkan nilai rata-rata LQ yang beragam. Di kota Pontianak terdapat 14 (empat belas) sektor ekonomi yang menunjukkan nilai  $LQ > 1$  yang merupakan sektor basis yang mana sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan di Kota Pontianak sendiri maupun memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Sektor tersebut yaitu, Sektor Industri pengelolaan dengan LQ rata-rata sebesar 1.03, Sektor Pengadaan listrik dan gas dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.33, Sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2.79, Sektor Konstruksi dengan hasil LQ rata-rata sebesar 1.39, Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.30, Sektor Transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2.30, Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum dengan hasil LQ rata-rata sebesar 1.50, Sektor Informasi dan komunikasi dengan hasil rata-rata LQ sebesar 1.08, Sektor Jasa keuangan dan asuransi dengan nilai



LQ rata-rata sebesar 2.33, Sektor Jasa perusahaan dengan LQ rata-rata sebesar 1.43, Sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.03, Sektor Jasa pendidikan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1.65, Sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan LQ rata-rata sebesar 1.19, Sektor Jasa lainnya dengan hasil LQ rata-rata sebesar 1.92. Sedangkan di Kota Pontianak terdapat 2 (dua) sektor yang mempunyai nilai  $LQ < 1$  dan merupakan sektor non basis yang menunjukkan sektor ini belum dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak sendiri maupun memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Sektor tersebut yaitu, Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 0.06 dan Sektor Real estate dengan LQ rata-rata sebesar 0.95.

Sektor ekonomi potensial dengan kriteria tergolong dalam sektor yang memiliki daya saing yang relatif tinggi dan pertumbuhannya cepat terhadap sektor yang sama di tingkat Provinsi ( $D_j$  rata-rata  $> 0$ ) serta memiliki tingkat kepotensialannya baik sekali (tipologi II). Sektor yang kepotensialannya baik sekali untuk di kembangkan sebagai pergeseran/peranan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yaitu Sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum, Sektor Jasa perusahaan, Sektor Pendidikan, Sektor Jasa kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anum, Maharida. 2017. *Analisis Sektor Ekonomi Potensial Di Kota Bogor*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta. STIE YKPN
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. UPP STIE YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Pontianak dalam Angka 2016*. BPS Kota Pontianak
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kota Pontianak dalam Angka 2017*. BPS Kota Pontianak
- \_\_\_\_\_. 2019. *Kota Pontianak dalam Angka 2018*. BPS Kota Pontianak
- \_\_\_\_\_. 2017. *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Kalbar
- \_\_\_\_\_. 2018. *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2017*. BPS Provinsi KalBar
- \_\_\_\_\_. 2019. *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2018*. BPS Provinsi KalBar
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Fatmasari, Dini Sapta Wulan. 2007. *Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang (Pendekatan Model Basis Ekonomi)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang
- Gujarati, Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrik*. Jakarta: Erlangga
- Hilmiyati, Fatia. 2013. *Analisis Potensi Sektor Ekonomi di Kota Depok*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Irfan, Syauqi Beik, & Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Per. Jakarta
- Istiqomah, Azizatul. 2019. *Analisis Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2017*. Skripsi. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

- Kuncoro. Mudrajad. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- M.L. Jhingan. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. PT. Rajawali Pers
- Nurdini. Siti. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka Di Kalimantan Barat Periode Tahun 2009-2013*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam. IAIN Pontianak
- Purwanto. Heru. 2017. *Pengembangan Sub Sektor Potensial Pada Sektor Pertanian*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
- Raharja. Pratama & Manurung. Mandala. 2004. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Riskiyanti. Sri. 2017. *Analisis Pengembangan Sub Sektor Potensial Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Landak Tahun 2011-2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
- Saerofi. Mujib. 2005. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Sukirno. Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Suyatno. 2000. *Analisis Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri: Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 Dan UU No. 5/1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1, No. 2
- Tarigan. R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Tarigan. Robinson. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro. M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Alih Bahasa Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michel P, & Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesebelas. Jilid 1 Terjemahan Haris Munandar. Erlangga. Jakarta

- Umami. Reza Rosyida. 2014. *Analisis Sektor Potensial Pengembangan Wilayah Guna Mendorong Pembangunan di Daerah Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Widodo. Urip. 2019. *Analisis Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
- Yustika. Ahmad Erani. 2005. *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*. Bayumedia. Malang